

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BAPPEDA

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BAPPEDA

1. Belum optimalnya kapasitas aparatur perencana yang mempengaruhi kualitas perencanaan.
2. Sistem e-planning masih dalam tahap pengembangan sehingga dalam penerapannya masih diperlukan banyak penyesuaian.
3. Keterbatasan daerah dalam mengakomodir aspirasi kebutuhan masyarakat.
4. Penyusunan perencanaan pembangunan belum sepenuhnya menggunakan pendekatan holistik, integratif, tematik dan spasial.
5. Perubahan kebijakan nasional yang sering menyebabkan keterlambatan dalam pencapaian indikator kinerja dalam RPJMD.
6. Data dan informasi pendukung perencanaan pembangunan masih belum memenuhi kebutuhan dan belum tepat waktu.
7. Implementasi dokumen perencanaan dan hasil kajian/litbang belum optimal.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Bappeda Kabupaten Pasuruan mendukung terwujudnya visi Bupati Pasuruan tahun 2018-2023 sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 yaitu “Mewujudkan Kabupaten Pasuruan Yang Sejahtera, Maslahat dan Berdaya Saing”, dan mendukung misi bupati ke 4 yaitu **Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif, bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis yang berbasis pada teknologi informasi**. Misi tersebut diwujudkan dengan tujuan Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif. Bappeda mendukung pada sasaran Meningkatnya

Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan indikator Nilai SAKIP.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga dan Provinsi Jawa Timur

3.3.1 Telaah Renstra Kementerian PPN/BAPPENAS

Visi dan misi Kementerian PPN/Bappenas yang akan dicapai melalui tujuan dan pelaksanaan program dan kegiatan mendukung pencapaian target, sasaran, visi dan misi RPJMN 2015-2019, dan selanjutnya mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara sesuai amanat UUD 1945 yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, oleh karena itu, visi kementerian PPN/Bappenas 2015-2019 adalah : ***“Mewujudkan kementerian PPN/Bappenas yang andal, kredibel dan proaktif untuk mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara”***

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 3 (tiga) misi sesuai dengan peran-peran Kementerian PPN/Bappenas, adalah :

1. Menyusun rencana pembangunan nasional yang berkualitas dalam rangka :
 - a. Mengintegrasikan, memadukan (sinkronisasi) dan mensinergikan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu dan antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dengan daerah;
 - b. Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional, kajian dan evaluasi kebijakan yang berkualitas terhadap permasalahan pembangunan, sebagai masukan bagi proses perencanaan berikutnya dan atau untuk perumusan kebijakan pembangunan di berbagai bidang;

- c. Melakukan koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan tugas-tugas Kementerian PPN/Bappenas.

3.3.2 Telaah Renstra BAPPEDA Provinsi Jawa Timur

Bappeda Propinsi Jawa Timur untuk kurun waktu 2014-2019 akan mewujudkan visi : “Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Partisipatif, Profesional, Inovatif dan Bertanggungjawab”. Untuk itu, Bappeda Propinsi Jawa Timur menetapkan misi 2014-2019 sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan profesionalisme Sumber Daya Manusia;
- b. Memantapkan penyelenggaraan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang partisipatif dan inovatif;
- c. Melakukan pendataan, pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah

Visi penataan ruang wilayah adalah terwujudnya penataan ruang wilayah yang mampu mendorong investasi produktif, lestari dan optimal secara berkeadilan bagi seluruh masyarakat. Adapun misi-misi penataan ruang wilayah Kabupaten Pasuruan adalah:

- a. Mengoptimalkan instrumen-instrumen yang berada dalam sistem penataan ruang guna terwujudnya tujuan penataan ruang;
- b. Mewujudkan struktur ruang yang berimbang guna mendorong pertumbuhan wilayah sekaligus mengurangi kesenjangan antar wilayah guna meningkatkan kemandirian masyarakat yang berdaya saing tinggi;
- c. Mewujudkan pola ruang yang produktif guna menunjang produktifitas wilayah secara berkelanjutan;

- d. Mewujudkan program pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang secara konsisten guna mendukung manfaat ruang dan mensejahterahkan masyarakat;
- e. Mewujudkan terciptanya kepastian hukum dalam kegiatan usaha sesuai rencana tata ruang serta mendorong peluang investasi yang lebih produktif.

Tabel 3.1
Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan

No.	Struktur Ruang Saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan OPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan OPD
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)
	KAWASAN PERDESAAN PPd (Pusat Pelayanan desa) ; Pusat Pelayanan Perdesaan sudah terbentuk pd masing-masing desa tetapi yg belum adalah linkage-nya (sistem)	1. Perwujudan Pusat Kegiatan Perdesaan 1.1. Pengembangan kawasan perdesaan sesuai potensi masing-masing kawasan a. Pengembangan kawasan perdesaan berbasis agrowisata & minapolitan pd wilayah Pasuruan; b. Peningkatan pertanian khususnya pd wil. Pasuruan Timur & Selatan; serta c. Pengembangan pusat pengolahan dan hasil pertanian	<i>-updating dan penyiapan data pendukung perenc. pembangunan daerah yg lebih baik dan terencana.</i> <i>-Dibutuhkan Perenc. Tata Ruang yg lebih rinci/detail sebagai pendetailan dr RTRW untuk Kawasan Perkotaan dan Perdesaan Kecamatan se Kabupaten Pasuruan</i> <i>-Dibutuhkan suatu Dokumen Perencanaan yg lebih spesifik ke arah pengembangan kawasan perdesaan (pertanian, agropolitan, minapolitan)</i>	semua Desa/Kel. di Wilayah Kab. Pasuruan

No.	Struktur Ruang Saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan OPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan OPD
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)
	KAWASAN PERKOTAAN PKL (Pusat Kegiatan Lokal) Perkotaan Bangil	1. Pengembangan pusat kegiatan perkotaan		
	PKLp Pandaan PPK Gempol, Tutar	a. Pengembangan perkotaan utama di Kab. Pasuruan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Kegiatan Lokal promosi (PKLp) dan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); b. Mendorong & mempersiapkan perkotaan Bangil sebagai pusat pemerintahan kabupaten dan perkotaan Pandaan sebagai pusat perdagangan dan jasa; serta c. Mendorong pengembangan perkotaan Rembang sebagai perkotaan dengan fungsi utama perindustrian. 3.2. Membentuk pusat kegiatan yang terintegrasi di Kabupaten Pasuruan	<i>-Dibutuhkan suatu Dokumen Perencanaan yg lebih spesifik ke arah pengembangan kawasan perkotaan (ibukota kabupaten, PKLp dan PPK)</i>	# PKL Bangil (Kota Bangil) # PKLp terdiri atas:Perkotaan Pandaan, Purwosari, Pasrepan, Grati, dan Perkotaan Gondang wetan, # PPK adalah Ibukota Kecamatan Prigen, Sukorejo, Rembang, Pohjentrek, Gempol, Kraton, Lekok, Nguling, Winongan, Rejoso, Wonorejo, Kejayan, Purwodadi, Tutar, Puspo, Tosari, Beji, dan Lumbang;

No.	Struktur Ruang Saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan OPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan OPD
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)
		4. Penetapan fungsi kawasan Kawasan Perdesaaan 3.1. Pengembangan produk unggulan perdesaan : 3.2. Pengembangan kawasan lahan abadi pertanian pangan 3.3. Pengembangan agrowisata pada kawasan potensial		PPK Kec. di Kab. Pasuruan Kec. Prigen, Tosari, Tutar,&Rejoso
		3.4. Pengembangan sistem agropolitan pada kawasan potensial		Kec. Tutar, Purwodadi, Puspo, Tosari, Kejayan, Wonorejo
		3.5. Pengembangan sistem minapolitan pada kawasan potensial Kawasan Perkotaan		Kec. Tutar, Pasrepan, Puspo, Tosari, Kejayan, Wonorejo, Purwodadi, Kec. di wil. Pesisir KabPas (Bangil, Kraton, Rejoso, Lekok & Nguling), Kec. Grati, Gempol, Pandaan, Beji, Pasrepan

No.	Struktur Ruang Saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan OPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan OPD
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)
		3.6 Pengembangan kawasan perkotaan utama di Kabupaten Pasuruan 3.7. Pengembangan pelayanan sosial ekonomi sesuai sistem perkotaan dengan peran masing-masing a. Penetapan ibukota Kabupaten Pasuruan b. Penetapan pusat perdagangan/jasa; c. Pengembangan pusat kegiatan ekonomi melalui pengembangan industri; d. Pengembangan pusat pelayanan wisata; serta e. Pengembangan pusat kegiatan ekonomi pendukung pertanian.		Perkotaan (PKL / PKLp) Perkotaan Bangil Perkotaan Pandaan Perkotaan Gempol dan Rembang Perkotaan Pandaan, Purwosari & Grati
A.4.		Perwujudan Sistem Prasarana Wilayah 4.1. Transportasi 1. Transportasi Darat		

No.	Struktur Ruang Saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan OPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan OPD
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)
		a. Pengemb. prasarana jaringan jalan guna menunjang pertumbuhan dan pemerataan pembangunan wilayah: b. Pengembangan infrastruktur pendukung prasarana jaringan jalan: 1). Peningkatan infrastruktur pendukung dan pelayanan terminal tipe A 2). terminal tipe C 2. Transportasi Laut a. Peningkatan & pengemb. jalur internal b. Pengemb. jalan penghubung utama antar Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dg Kec. sekitarnya; c. Optimalisasi pel. PPI dari segi ketersediaan sarana pendukung;	- Dibutuhkan peny. RPIJM Bidang Infrastruktur maupun evaluasi/review	Kab. Pasuruan Kec. Gempol Kec. Bangil – Kec. Lekok. Kec. Lekok Kec. Lekok dan Kec. Nguling

No.	Struktur Ruang Saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan OPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan OPD
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)
		d. Optimalisasi pengembangan PPI dari segi sosial ekonomi 4.2. Prasarana Telematika a. Penyediaan tower BTS (<i>Base Transceiver Station</i>) secara bersama		Kec. Lekok dan Kec. Nguling Menyebar pada seluruh Kecamatan di kabupaten Pasuruan
		b. Pengadaan sistem internet, 3G dan GPS c. Penyediaan sistem regulasi perencanaan & pengaturan (penataan ruang udara)		
		4.3. Prasarana Lingkungan a. Pengembangan TPA regional 4.4. Prasarana Energi/listrik 4.5. Prasarana Pengairan		Kec. Beji, Beberapa wil. kec. di Kab.Pasuruan Wil. Kab. Pas. Wil. Kab. Pasuruan

No.	Struktur Ruang Saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan OPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan OPD
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)
		a. Pemb. bang. Bendung (dam, cek dam, embung) & peningk. bang. Bendung yg sudah ada sbg bang. pengisi/penyimpan air ketika kering dan/atau pengendali luapan air ketika banjir b. Penanaman pohon pencegah longsor c. Pemb. dan perbaikan pintu air		Kec. Purwosari, Kec. Lekok, Kec. Bangil, Kec. Pandaan, Kec. Kraton, dan Wil. Kab. Pasuruan lain Wil. Kab. Pasuruan Wil. Kab. Pasuruan

Sumber: RTRW Kabupaten Pasuruan Tahun 2009-2029, Bappeda Kabupaten Pasuruan; Hasil Analisa

Tabel 3.2
Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan

No.	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan OPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Perwujudan Kaw.Lindung				
	1.1. Hutan Lindung	Hutan Lindung (milik negara); Hutan Rakyat (milik masyarakat); kawasan permukiman	a. Pemantapan kawasan lindung bernilai strategis dalam penyediaan air b. Memelihara habitat dan keaslian ekosistem	• <i>Peningkatan Koordinasi (perenc & pengendalian) lintas OPD untuk Perenc Pemb. Bid. Ekonomi, Perenc. pengembangan infrastruktur, Kerawanan Bencana, Penyelenggaraan Penataan Ruang, Perenc. Pemb. Bid. Sosbud</i> • <i>Peny. Renc. Rinci Tata Ruang (RDTR) sbg penjabaran RTRW Kab. Pasuruan, serta merupakan pedoman perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang/lahan di Wil. Kab. Pasuruan</i>	Kec. Tutar, Puspo, Tosari, dan Lumbang, Prigen, Gempol, Purwodadi
	1.2. Kaw. pantai berhutan bakau (mangrove)	Kawasan pantai berhutan bakau (mangrove)			Sepanjang pantai utara Pasuruan
	1.3. Kaw. Taman Nasional	Kaw. Taman Nasional	Perlindungan Taman Nasional Bromo - Tengger – Semeru		Kec. Tutar, Puspo, Tosari, dan Lumbang

No.	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan OPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	1.4. Kaw. Taman Hutan Raya	Kaw. Taman Hutan Raya (TAHURA) R. SOERJA	Perlindungan Taman Hutan Raya R. Soeryo		Kec. Prigen, Purwodadi, Prigen dan Purwosari
	1.5. Kaw. Taman Wsata Alam (TWA)	Kaw. Taman Wsata Alam (TWA) : TWA TRETES & TWA G. BAUNG	Perlindungan wisata alam: 1). TWA Tretes 2). TWA G. Baung		Kec. Prigen, Purwodadi
	1.6. a. Kaw. Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan	Kaw. Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan masih belum ada pengembangan kawasan-kawasan baru selain yg telah ada & berkembang	a. Perlindungan Cagar budaya	<i>Diperlukan perencanaan makro yg lebih spesifik untuk mendukung optimalisasi perencanaan pembangunan & wilayah (spasial)</i> <i>Dibutuhkan Masterplan Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah, RIPPDA (Pariwisata), Industri, Koperasi, Pondok Pesantren,</i>	Kec. Gempol, Kec. Pandaan Kec. Purwosari, Kec. Purwodadi, Kec. Prigen, Kec. Winongan, Kec. Rejosari, Kec. Pandaan, Kec. Tosari
	b. Kaw. Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan:	b. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan: 1) Kaw. Kebun Raya Purwodadi	b. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan: 1) Kawasan Kebun Raya Purwodadi		Kec. Purwosari dan Kec. Purwodadi

No.	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan OPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	1.7. Kaw. Rawan Bencana Alam	Kawasan Rawan Bencana Alam	a. Kawasan rawan bencana banjir b. Kawasan rawan bencana alam lainnya		Kec. Gempol; Kec. Beji; Kec. Rembang; Bangil; Kraton; Grati; Pohjentrek; Gondangwetan; Rejos; Winongan; serta Lekok
	1.8. Kaw. Lindung Geologi	Kawasan Lindung Geologi	a. Konservasi kaw. rawan bencana alam letusan gunung berapi: 1)G. Bromo; 2)G.Welirang b. Kaw. rawan bencana gempa bumi dan longsor c. Kaw. rawan bencana alam lainnya:		Kec. Tosari, Prigen dan Purwosari.
	1.9. Kaw. Lindung Lainnya	Kawasan Lindung Lainnya	1). Kaw. pengungsian satwa meliputi: Pengungsian satwa Taman Nasional Bromo-Tengger-Semeru		(Kec. Tuter; Puspo; Tosari; Lumbang; Prigen Kec. Tuter, Kec. Tosari, Kec. Puspo, dan Kec. Lumbang.

No.	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan OPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			2). Kaw. Imbuhan Air Tanah Kawasan yang terletak di Peg.Arjuna-Welirang & Peg. Bromo d. Kaw. sempadan Sumber Mata Air		Kec. Tosari, Tuttur, Puspo, Lumbang, Purwodadi, Purwosari, Prigen dan Gempol Mata air Umbulan dan Sumber Mata Air Banyu Biru di Kec. Winongan
B.2	Perwujudan Kaw. Budidaya 2.1. Renc. Peruntukan Kaw. H.Pro-duksi 2.2. Renc. Peruntukan Kaw. Perta-nian	Kaw. Hutan Produksi (milik negara); Kaw. Hutan Rakyat (milik masy dg fungsi hutan produksi/ konservasi); Kaw. Pertanian lahan basah (sawah); Kawasan Pertanian Lahan kering, kawasan hortikulturan, kawasan terbangun (permukiman/perumahan, fasilitas, perdag-jasa,industri,peternakan,dsbn ya)	2.1. Pengemb. hutan produksi bernilai ekonomi tinggi dengan fungsi lindung diantaranya dengan reboisasi tanaman untuk menahan tanah 2.2. Pengemb. Kaw. pertanian a.Pengemb. Kaw. pertanian lahan basah		Kec. Gempol, Purwodadi, Purwosari, Prigen, Tuttur, Puspo, Tosari, Pasrepan, Kec. Lumbang, Kec. Kejayan, Kec. Nguling, Kec. Grati, Kec. Winongan Kec. Nguling, Grati, Winongan, Lekok, Rejoso, Gondangwetan, Kejayan, Pohjentrek, Wonorejo, Purwodadi, Purwosari, Sukorejo,

No.	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan OPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					Pandaan, Prigen,Gempol, Beji, Bangil, Rembang dan Kec. Kraton
			b.Pengemb. kaw. pertanian lahan kering		pengembangan kawasan tegalan/ladang dan sawah tadah hujan yang tersebar di Kab. Pas.
			c.Pengemb. Kaw. holtikultura		Kec. Tutur, Tosari, Lumbang, Pasrepan dan Kec. Pandaan
	2.3. Renc. Peruntukan Kaw. Perkebunan		2.3 Pengembangan Kaw. Perkebunan		Kec. Pasrepan & Kec. Kejayan
	2.4. Renc. Peruntukan Kaw. Perikanan		2.4. Pengembangan kawasan perikanan		menyebar di hampir semua Kec. yang ada di Kab. Pas.
	2.5. Rencana Peruntukan Kawasan Peternakan		2.5. Pengembangan Kawasan Peternakan		menyebar di hampir semua Kec. yang ada di Kabupaten Pasuruan
	2.6. Rencana Peruntukan Kaw. Pertambangan		2.6. Pengembangan Kawasan Pertambangan		menyebar secara proporsional & terbatas di beberapa kec. di Kab. Pas. sesuai sebaran

No.	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan OPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	2.7. Rencana Peruntukan Kaw. Peruntukan industri 2.8. Renc. Kaw. tujuan pariwisata & daya tarik wisata 2.9. Renc. Kaw. permukiman 2.10 Renc. Kaw. perdagangan		2.7. Pengembangan Kaw. peruntukan industri 2.8. Pengemb. Kaw. tujuan pariwisata & daya tarik wisata 2.9. Pengembangan Kawasan permukiman 2.10 Pengembangan Kawasan perdagangan		potensi & kendala yg ada. Kab. Pas.
C.	Rencana Kawasan Strategis 1.1. Kawasan Strategis Hankam	Kawasan militer (KSN)	Perwujudan Kawasan Strategis Kab	- <i>Peningkatan Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan, Kajian & Dokumen perencanaan Ruang/Wilayah khususnya diprioritaskan untuk untuk kaw strategis dan andalan</i>	
	1.2. Kawasan Strategis Ekonomi a. Kaw. Industri & peruntukan	Kawasan Industri & peruntukan industri	1.2. Kawasan Strategis Ekonomi a. Kawasan Industri & peruntukan industri ;		

No.	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan OPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	industri ;				
	b. Kaw. sekitar interchange tol; c. Kaw. agropolitan; d. Kaw. minapolitan e. Kaw. airlangga city f. Kaw. pesisir 1.3. Kaw. strategis untuk kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam &/atau teknologi tinggi :	- -	b. Kawasan sekitar interchange tol; c. Kawasan agropolitan; d. Kawasan minapolitan e. Kawasan airlangga city f. Kawasan pesisir 1.3. Kawasan strategis untuk kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi :		
	a. kaw. pengemb. Stasiun Pengamat Dirgantara b. kaw. PLTGU Grati	kawasan pengembangan Stasiun Pengamat Dirgantara (LAPAN) kawasan PLTGU Grati (PT. INDONESIA POWER)	a. kawasan pengembangan Stasiun Pengamat Dirgantara b. kawasan PLTGU Grati		Desa Watukosek, Kecamatan Gempol Desa Wates, Kec. Lekok

No.	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan OPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	1.4. Kawasan sosio-budaya: 1.5. Penyelamatan lingkungan hidup: Kaw Taman Nasional Bromo-Tengger-Semeru & Tahura R. Suryo;	Kawasan sosio-budaya: Kawasan Taman Nasional Bromo-Tengger-Semeru dan Tahura R. Suryo;	1.4. Kawasan sosio-budaya: 1.5. Penyelamatan lingkungan hidup: Kawasan Taman Nasional Bromo-Tengger-Semeru dan Tahura R. Suryo;		Kec. Tukur, Kec. Tosari, Kec. Puspo dan Kec. Lumbang

Sumber: RTRW Kabupaten Pasuruan Tahun 2009-2029, Bappeda Kabupaten Pasuruan; Hasil Analisa

3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Undang – Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *memberikan amanat kepada Pemerintah Daerah untuk* menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) *guna* memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program Kegiatan Rencana Pembangunan. *Telaah KLHS dalam dokumen RENSTRA ini merupakan bagian dari* KLHS RPJMD adalah analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD. Strategis adalah hal yang menunjukkan komitmen terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan dimensi lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Dari permasalahan-permasalahan yang ada dengan memperhatikan telaah kebijakan dari Pemerintah yang lebih tinggi dan dokumen terkait, maka dilakukan pembobotan untuk menentukan isu strategis.

Masalah 1	Kriteria	Bobot	nilai (1-3)	Bobot x Nilai
Belum optimalnya kapasitas aparatur perencana yang mempengaruhi kualitas perencanaan	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	10	1	10
	Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah	25	3	75
	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	25	3	75

	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	15	2	30
	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	10	2	20
	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	15	2	30
	Total 1	100	13	240

Masalah 2	Kriteria	Bobot	nilai (1-3)	Bobot x Nilai
Sistem e-planning masih dalam tahap pengembangan sehingga dalam penerapannya masih diperlukan banyak penyesuaian.	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	10	3	30
	Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah	25	2	50
	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	25	2	50
	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	15	2	30
	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	10	3	30
	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	15	1	15
	Total 2	100	13	205

Masalah 3	Kriteria	Bobot	nilai (1-3)	Bobot x Nilai
Keterbatasan daerah dalam mengakomodir aspirasi kebutuhan masyarakat	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	10	3	30
	Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah	25	3	75

	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	25	3	75
	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	15	3	45
	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	10	1	10
	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	15	1	15
	Total 3	100	14	250

Masalah 4	Kriteria	Bobot	nilai (1-3)	Bobot x Nilai
Penyusunan Perencanaan pembangunan belum sepenuhnya menggunakan pendekatan holistik, integratif, tematik dan spasial	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	10	3	30
	Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah	25	3	75
	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	25	3	75
	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	15	3	45
	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	10	3	30
	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	15	2	30
	Total 4	100	17	285

Masalah 5	Kriteria	Bobot	nilai (1-3)	Bobot x Nilai
Perubahan kebijakan nasional yang sering	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	10	3	30

menyebabkan keterlambatan dalam pencapaian indikator kinerja dalam RPJMD.	Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah	25	1	25
	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	25	3	75
	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	15	3	45
	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	10	1	10
	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	15	1	15
	Total 5	100	12	200

Masalah 6	Kriteria	Bobot	nilai (1-3)	Bobot x Nilai
Data dan informasi pendukung perencanaan pembangunan masih belum memenuhi kebutuhan dan belum tepat waktu.	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	10	2	20
	Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah	25	3	75
	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	25	3	75
	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	15	2	30
	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	10	1	10
	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	15	1	15
	Total 6	100	12	225

Masalah 7	Kriteria	Bobot	nilai (1-3)	Bobot x Nilai
Implementasi dokumen perencanaan dan hasil kajian/litbang belum optimal	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	10	1	10
	Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah	25	3	75
	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	25	3	75
	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	15	3	45
	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	10	2	20
	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	15	1	15
	Total 7	100	13	240

Dari hasil penentuan isu strategis, maka yang menjadi prioritas untuk ditangani adalah :

1. Penyusunan perencanaan pembangunan belum sepenuhnya menggunakan pendekatan holistik, integratif, tematik dan spasial.
2. Keterbatasan daerah dalam mengakomodir aspirasi kebutuhan masyarakat.
3. Belum optimalnya kapasitas aparatur perencana yang mempengaruhi kualitas perencanaan.
4. Implementasi dokumen perencanaan dan hasil kajian/litbang belum optimal.
5. Data dan informasi pendukung perencanaan pembangunan masih belum memenuhi kebutuhan dan belum tepat waktu.
6. Sistem *E-Planning* masih dalam tahap pengembangan sehingga dalam penerapannya masih diperlukan banyak penyesuaian.
7. Perubahan kebijakan nasional yang sering menyebabkan keterlambatan dalam pencapaian indikator kinerja dalam RPJMD.

Dari hasil *skoring* tersebut maka diperoleh isu strategis sebagai berikut :

1. Optimalisasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Pengembangan Sumber Daya Perencanaan
3. Belum sepenuhnya rekomendasi hasil perencanaan serta kelitbangan ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah.